

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PAREPARE MENURUT PENGELUARAN

*Gross Domestic Regional Product of  
Parepare City  
by Expenditure*

# 2016-2020



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PAREPARE MENURUT PENGELUARAN

*Gross Domestic Regional Product of  
Parepare City  
by Expenditure*

# 2016-2020



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA PAREPARE  
MENURUT PENGELUARAN 2016-2020**

***GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF  
PAREPARE CITY  
BY EXPENDITURE 2016-2020***

ISBN/ ISBN: 978-623-94847-7-4  
Nomor Publikasi : 73720.2104  
Katalog BPS/ *BPS Catalogue*: 9302020.7372

Ukuran Buku/ *Book Size*: 21,5 cm x 29,7 cm  
Jumlah halaman/ *Total pages*: xi + 53 halaman

Naskah/ *Script*:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/  
*Regional Account and Statistical Analysis Division*

Gambar Kulit/ *Cover*:  
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik/  
*Regional Account and Statistical Analysis Division*

Diterbitkan Oleh/ *Published By*:  
©Badan Pusat Statistik Kota Parepare/  
*BPS-Statistics of Parepare City*

Dicetak Oleh/ *Printed By*:  
Badan Pusat Statistik Kota Parepare  
*BPS-Statistics of Parepare City*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

*Prohibited announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of the contents of this book for commercial purposes without the written permission of the Central Bureau of Statistics.*

## **TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM**

**Penanggungjawab Umum/*General in Charge*:**

Guruh Wahyu Martopo, S.Si, M.Si.

**Penyunting/*Editor*:**

Darmawan, dkk

**Penulis/*Writer*:**

Nuranita H, SST.

**Pengolah Data/*Data Processor*:**

Nuranita H, SST.

**Gambar Kulit/*Cover Design*:**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS-Parepare

<https://pareparekota.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Parepare menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kota Parepare. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Parepare secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Parepare sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Ucapan yang sama disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Parepare (Diskominfo), serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Parepare, 29 April 2021

BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PAREPARE  
KEPALA,



Guruh Wahya Martopo





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	x
<b>I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1    Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2    Perubahan Tahun Dasar	6
<b>II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA</b>	11
2.1    Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2    Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	15
2.3    Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	16
2.4    Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5    Perubahan Inventori (PI)	21
2.6    Ekspor - Impor	23
<b>III. TINJAUAN EKONOMI KOTA PAREPARE MENURUT PDRB PENGELUARAN</b>	25
3.1    Tinjauan Agregat PDRB Parepare Menurut Pengeluaran	27
3.2    Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
3.3    Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	33
3.4    Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	34
3.5    Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	35
3.6    Perkembangan Perubahan Inventori	36
<b>IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA PAREPARE</b>	39
4.1    PDRB	41
4.2    Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	42
<b>V. PENUTUP</b>	43
<b>VI LAMPIRAN</b>	47



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	27
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga BKonstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	28
Tabel 3	Distribusi PDRB adhb Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	29
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB adhk 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	30
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	31
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Parepare, Tahun 2016-2020	32
Tabel 7	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Parepare, Tahun 2016-2020	33
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2016-2020	34
Tabel 9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Parepare, Tahun 2016-2020	36
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Parepare, Tahun 2016-2020	37
Tabel 11	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Parepare, Tahun 2016-2020	41
Tabel 12	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Parepare, tahun 2016-2020	42

## DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	Perbandingan PDRB adhb dan adhk 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020	29

<https://pareparekota.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2016-2020(Juta Rupiah)	49
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2016-2020(Juta Rupiah)	50
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2016-2020(persen)	51
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2016-2020 (persen)	52
Tabel 5.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Parepare Pengeluaran, 2016-2020 (persen)	53

<https://pareparekota.bps.go.id>

**I BAB I**  
**PENDAHULUAN**



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut



jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

## Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

## Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



**II BAB II**  
***METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA***

<https://pareparekota.bps.go.id>





### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>5</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

<sup>5</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

## v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

## iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

## iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS

f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

**v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa



### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup :

- 1) Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
- 2) Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

- 3) Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

#### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

#### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir

perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

## v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

### a. **Metoda Revaluasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

### b. **Metoda Deflasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -  
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

## 2.6 **EKSPOR - IMPOR**

### i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

## ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

## iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

## iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

**III BAB III**  
**TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PAREPARE**  
**MENURUT PDRB PENGELUARAN**  
**2016 - 2020**

<https://pareparekota.bps.go.id>





Perubahan struktur ekonomi Kota Parepare sebagai akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan nasional dan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Parepare sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PAREPARE MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Parepare Tahun 2020 meningkat. Secara umum perekonomian terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan arah yang positif walaupun agak melambat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.940.512,19	3.258.619,43	3.582.562,30	3.923.662,88	3.983.472,78
2. Konsumsi LNPRT	25.107,76	29.107,19	34.915,62	46.361,65	44.427,08
3. Konsumsi Pemerintah	902.929,73	968.494,80	893.664,96	981.208,79	982.740,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.341.696,82	2.505.048,15	2.732.938,79	3.067.965,43	3.070.243,05
5. Perubahan Inventori	14.425,36	9.123,11	5.752,92	3.800,58	5.903,32
6. Net Ekspor antar daerah	(698.744,87)	(677.811,34)	(647.472,05)	(792.598,20)	(763.135,30)
<b>Total PDRB</b>	<b>4,434,865.41</b>	<b>5,062,244.63</b>	<b>5,525,927.00</b>	<b>6,092,581.33</b>	<b>6,602,518.47</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Nilai PDRB Parepare atas dasar harga berlaku (*adhb*) selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan signifikan yakni sebesar 4,44 trilyun rupiah (2016); dan pada tahun 2020

sebesar 6,60 trilyun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (*adhk*) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Tabel dibawah ini akan menunjukkan perkembangan ekonomi Kota Parepare berdasarkan PDRB *adhk* dari tahun 2016-2020

**Tabel 2. PDRB atas dasar Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare  
Tahun 2016-2020**

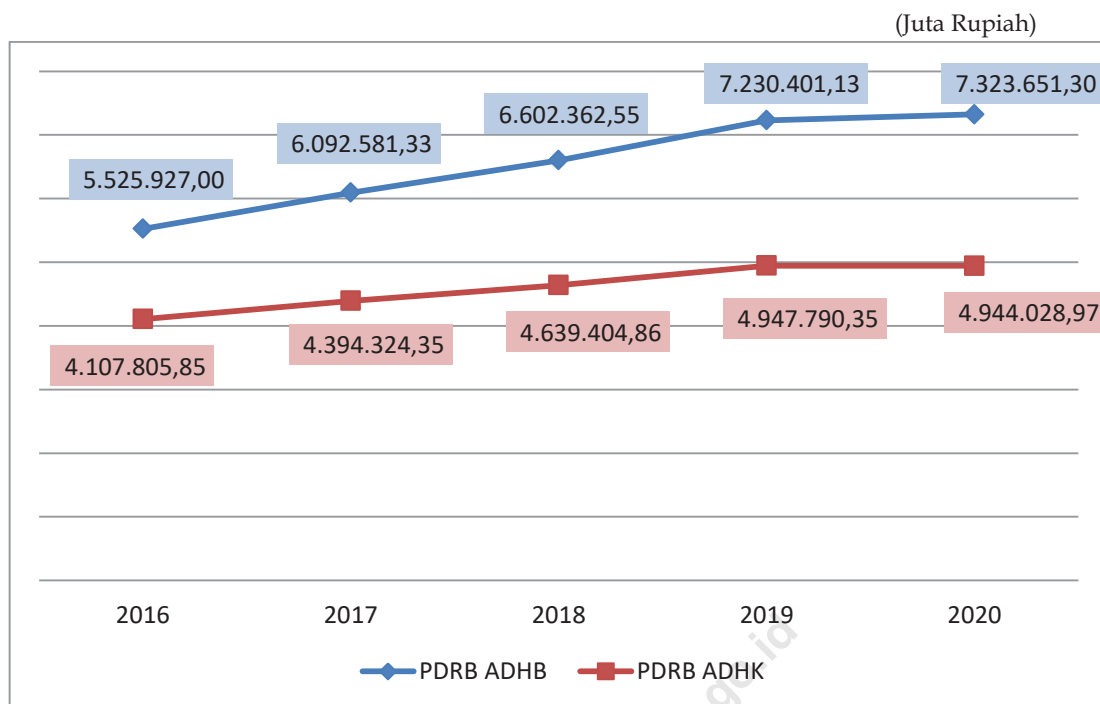
Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.171.989,96	2.302.179,48	2.443.713,32	2.597.927,82	2.575.619,45
2. Konsumsi LNPR	19.492,81	20.997,93	24.177,97	30.889,08	29.039,68
3. Konsumsi Pemerintah	785.251,77	812.406,53	701.666,19	767.995,24	765.032,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.672.344,36	1.741.948,25	1.830.293,09	1.950.564,05	1.942.648,54
5. Perubahan Inventori	12.490,92	8.286,18	5.378,80	2.687,25	4.056,20
6. Net Ekspor antar daerah	(553.763,97)	(491.494,03)	(365.824,51)	(402.273,10)	(372.367,75)
<b>Total PDRB</b>	<b>4.107.805,85</b>	<b>4.394.324,35</b>	<b>4.639.404,86</b>	<b>4.947.790,35</b>	<b>4.944.028,97</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Melalui pendekatan penghitungan *adhk*, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran *adhk* menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016-2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Parepare berdasarkan PDRB *adhk* dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB *adhb*, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB *adhk* juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB adhb dan adhk 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020**



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB *adhb* selalu lebih besar dari nilai PDRB *adhk*. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB *adhb*. Dalam PDRB *adhk* pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPR (PK-LNPR), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor dan impor antar daerah sebagai pengurang (X-M).

**Tabel 3. Distribusi PDRB adhb Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,21	53,49	54,26	54,27	54,39
2. Konsumsi LNPR	0,45	0,48	0,53	0,64	0,61
3. Konsumsi Pemerintah	16,34	15,90	13,54	13,57	13,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,38	41,12	41,39	42,43	41,92
5. Perubahan Inventori	0,26	0,15	0,09	0,05	0,08
6. Net Ekspor antar daerah	(12,64)	(11,13)	(9,81)	(10,96)	(10,42)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2016 - 2020, produk yang dikonsumsi di Kota Parepare sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Besarnya porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi diatas 40 persen. Di sisi lain, perdagangan antar daerah Parepare dan sekitarnya yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor antar daerah dan impor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor antar daerah.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB adhk 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Parepare Tahun 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,15	5,99	6,15	6,31	(0,86)
2. Konsumsi LNPRIT	2,08	7,72	15,14	27,76	(5,99)
3. Konsumsi Pemerintah	(1,54)	3,46	(13,63)	9,45	(0,39)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,31	4,16	5,07	6,57	(0,41)
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor antar daerah	(19,82)	(11,24)	(25,57)	6,83	(1,10)
<b>Total PDRB</b>	<b>6,87</b>	<b>6,97</b>	<b>5,58</b>	<b>6,65</b>	<b>(0,08)</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Parepare dari tahun 2016 - 2020 secara rata-rata mencapai 5,20 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,87 persen (2016); 6,97 persen (2017); 5,58 persen (2018); 6,65 persen (2019); dan -0,08 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 6,97 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-0,08 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare  
Tahun 2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,38	141,54	146,60	151,03	154,66
2. Konsumsi LNPRT	128,81	138,62	144,41	150,09	152,99
3. Konsumsi Pemerintah	114,99	119,21	127,36	127,76	128,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	140,02	143,81	149,32	157,29	158,04
5. Perubahan Inventori	115,49	110,10	106,96	141,43	145,54
6. Net Ekspor antar daerah	126,18	137,91	176,99	197,03	204,94
<b>Total PDRB</b>	<b>134,52</b>	<b>138,65</b>	<b>142,31</b>	<b>146,13</b>	<b>148,13</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit<sup>6</sup> PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa dari tahun ke tahun perubahan harga semakin tinggi.

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
Kota Parepare, Tahun 2016 – 2020**

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	2.940.512,19	3.258.619,43	3.582.562,30	3.923.662,88	3.983.472,78
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2.171.989,96	2.302.179,48	2.443.713,32	2.597.927,82	2.575.619,45

<sup>6</sup> Indeks perkembangan

Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	53,21	53,49	54,26	54,27	54,39
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	20.940,39	22.932,36	24.929,11	27.026,57	27.151,28
b. ADHK 2010	15.467,48	16.201,46	17.004,48	17.894,78	17.555,38
Pertumbuhan <sup>7</sup>					
a. Total konsumsi RT	4,15	5,99	6,15	6,31	-0,86
b. Konsumsi Perkapita	2,87	4,75	4,96	5,24	-1,90
Jumlah penduduk ( <i>Ribu Org</i> )	140,42	142,1	143,71	145,19	146,71

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adhb*) maupun riil (*adhk*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan atau kontraksi minus baik untuk total konsumsinya maupun untuk konsumsi perkapita. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19. Pandemi covid-19 menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016– 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 persinya masih 55,21 persen meningkat hingga sebesar 54,39 persen di tahun 2020. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara Umum, Rata-rata konsumsi perkapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan pertumbuhan total nilai konsumsi. Pada tahun 2016-2019 Rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik *adhb* maupun *adhk* 2010 kecuali di tahun 2020, pertumbuhan konsumsi perkapita mengalami penurunan karena turunnya konsumsi masyarakat.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adhk* sebesar 4,15 persen pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya yaitu sebesar 5,99 persen (2017) dan selanjutnya menguat sebesar 6,15 persen (2018); 6,31 persen (2019) dan terakhir mengalami kontraksi sebesar -0,86 persen (2020). Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita dari 2,87 persen ditahun 2016 meningkat menjadi 4,75 persen

<sup>7</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

di tahun 2017 dan 4,96 persen di tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebesar 5,24 persen dan terakhir kontraksi -1,90 persen.

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Parepare, Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>	<b>2020**)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	25.107,76	29.107,19	34.915,62	46.361,65	44.427,08
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	19.492,81	20.997,93	24.177,97	30.889,08	29.039,68
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,45	0,48	0,53	0,64	0,61

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Secara umum, walaupun proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB cukup kecil, namun rata-rata konsumsi LNPRT di Parepare terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adhb* maupun *adhk* 2010. Peran Pengeluaran Konsumsi LNPRT terhadap PDRB menunjukan fluktuasi yang tidak terlalu tajam dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, titik tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,64 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,45 persen.



### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Parepare serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Parepare, Tahun 2016 - 2020**

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	902.929,73	968.494,80	893.664,96	981.208,79	982.740,38
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	785.251,77	812.406,53	701.666,19	767.995,24	765.032,84
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	16,34	15,90	13,54	13,57	13,42
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	6.430,07	6.815,73	6.218,53	6.758,66	6.698,34
b. ADHK 2010	5.592,05	5.717,27	4.882,51	5.290,02	5.214,45
Pertumbuhan <sup>8</sup>					
a. Total konsumsi pemerintah	-1,54	3,46	-13,63	9,45	-0,39
b. Konsumsi perkapita	-2,75	2,24	-14,60	8,35	-1,43
Jumlah penduduk ( org)	140.423	142.097	143.710	145.178	146.714

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adhb* menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adhb* sebesar 902.929,73 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 968.494,80 juta rupiah dan pada tahun 2018 menurun dengan nilai sebesar 893.664,96 juta rupiah, pada tahun 2019 nilainya mencapai 981.208,79 juta rupiah. Dan yang terakhir tahun 2020 mencapai 982.740,38 juta rupiah.

Secara proporsi, pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan, dari 16,34 persen di tahun 2016 menjadi 15,90 persen pada tahun 2017 dan terus menurun hingga tahun 2018 sebesar 13,54 persen. selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 13,57 persen dan yang terakhir pada tahun 2020 sebesar 13,42 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2020; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018.

<sup>8</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)



Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita searah dengan peningkatan dan penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara total. Pada tahun 2020 konsumsi pemerintah perkapita *adhb* sebesar Rp.6.698,34 ribu (lihat tabel 8). Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita ini menggambarkan besarnya layanan yang telah diberikan pemerintah kepada setiap penduduk.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan fluktuasi baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Lima tahun terakhir Pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi. Tahun 2016 sebesar -1,54 persen, tahun 2017 sebesar 3,46 persen selanjutnya tahun 2018 sebesar -13,63 persen, tahun 2019 sebesar 9,45 persen dan yang terakhir tahun 2020 sebesar -0,39 persen.

Nilai rata-rata konsumsi pemerintah perkapita memiliki pola yang sama dengan konsumsi pemerintah secara total. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan cukup tinggi, kemudian pada dan pada tahun 2018 menurun hingga minus dua digit. Dan naik lagi di tahun 2019 dan terakhir turun lagi di tahun 2020 kembali menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif dari tahun 2016 pertumbuhan minus 1,54 persen (2016), dan tahun 2017 meningkat sebesar 4,50 persen dan di tahun 2018 kembali minus 13,63 persen selanjutnya tahun 2019 naik lagi hingga 9,45 persen dan tahun 2020 kembali menurun sebesar minus 0,39 persen.

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>9</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

<sup>9</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kota Parepare, Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	2.341.696,82	2.505.048,15	2.732.938,79	3.067.965,43	3.070.243,05
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1.672.344,36	1.741.948,25	1.830.293,09	1.950.564,05	1.942.648,54
Proporsi terhadap PDRB (%)	42,38	41,12	41,39	42,43	41,92
Pertumbuhan (%) <sup>10</sup>					
Total PMTB	3,31	4,16	5,07	6,57	(0,41)

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Namun secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan menguat dari tahun ke tahun kecuali bahkan di tahun 2020 mengalami kontraksi. Pada tahun 2016, pertumbuhan 3,31 persen menguat di tahun 2017 sebesar 4,16 persen begitu pula dengan tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,07 persen dan 6,57 persen. Dan terakhir tahun 2020 mengalami kontraksi -0,41 persen. Melambatnya pertumbuhan PMTB ini tidak berarti bahwa iklim investasi baik sedang lesu. Namun, karena pembangunan telah berjalan sekian lama dan telah terbentuk berbagai aset hasil investasi, maka kebutuhan untuk peningkatan investasi pada kelompok tertentu tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PMTB ini berkembang sesuai dengan pola kebutuhan pembangunan.

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan

<sup>10</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010 )

bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Parepare, Tahun 2016 – 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>	<b>2020**)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	14.425,36	9.123,11	5.752,92	3.800,58	5.903,32
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	12.490,92	8.286,18	5.378,80	2.687,25	4.056,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	<b>0,26</b>	<b>0,15</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2016 perubahan inventori adhb sebesar 14.425,36 juta rupiah dan tahun 2017, perubahan inventori sebesar 9.123,11 juta rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 5.752,92 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 3.800,58 juta rupiah, dan yang terakhir di tahun 2020 sebesar 5.903,32 juta rupiah.



<http://bareparekota.bps.go.id>

**IV BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**PENGELUARAN KOTA PAREPARE**

**2016-2020**



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Parepare di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

**Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Parepare, Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	5.525.927,00	6.092.581,33	6.602.362,55	7.230.401,13	7.323.651,30
- ADHK 2010	4.107.805,85	4.394.324,35	4.639.404,86	4.947.790,35	4.944.028,97
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	39.352,01	42.876,21	45.942,26	49.803,70	49.917,88
- ADHK 2010	29.253,08	30.924,82	32.283,10	34.080,85	33.698,41
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	6,87	6,97	5,58	6,65	(0,08)
Jumlah penduduk (org)	140.423	142.097	143.710	145.178	146.714
Pertumbuhan Penduduk	1,24	1,19	1,14	1,02	1,06

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

PDRB per kapita Kota Parepare menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 12), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Parepare rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di

masing-masing tahun tersebut, kecuali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh dunia.

Jumlah penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 1,13 persen setiap tahunnya. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita secara "riil" juga selalu meningkat di kisaran 4 hingga 6 persen. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Parepare selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

## 4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 12. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Parepare, Tahun 2016-2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*)</b>	<b>2020**)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)	3,293,845.43	3,630,067.95	3,868,549.68	4,266,004.20	4,511,142.89
- Rumah tangga	2.940.512,19	3.258.619,43	3.582.562,30	3.923.662,88	3.983.472,78
- LNPRRT	25.107,76	29.107,19	34.915,62	46.361,65	44.427,08
- Pemerintah	902.929,73	968.494,80	893.664,96	981.208,79	982.740,38
<b>PDRB (ADHB) (Juta Rp)</b>	<b>5.525.927,00</b>	<b>6.092.581,33</b>	<b>6.602.362,55</b>	<b>7.230.401,13</b>	<b>7.323.651,30</b>
<b>Proporsi</b>	<b>70,01</b>	<b>69,86</b>	<b>68,33</b>	<b>68,48</b>	<b>68,42</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi. Proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB memiliki kecenderungan semakin menurun secara perlahan. Dalam periode tahun 2016-2020, proporsinya masih berkisar 68-74 persen. Artinya produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) masih memiliki peran yang relative kecil.



<https://pareparekota.bps.go.id>

**V BAB V**  
***PENUTUP***



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Parepare pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota parepare terhadap ekonomi luar daerah.



<https://pareparekota.bps.go.id>



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare**

(Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.940.512,19	3.258.619,43	3.582.562,30	3.923.662,88	3.983.472,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	25.107,76	29.107,19	34.915,62	46.361,65	44.427,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	902.929,73	968.494,80	893.664,96	981.208,79	982.740,38
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.341.696,82	2.505.048,15	2.732.938,79	3.067.965,43	3.070.243,05
5. Perubahan Inventori	14.425,36	9.123,11	5.752,92	3.800,58	5.903,32
6. Net Ekspor-Impor	(698.744,87)	(677.811,34)	(647.472,05)	(792.598,20)	(763.135,30)
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5.525.927,00</b>	<b>6.092.581,33</b>	<b>6.602.362,55</b>	<b>7.230.401,13</b>	<b>7.323.651,30</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare

(Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.171.989,96	2.302.179,48	2.443.713,32	2.597.927,82	2.575.619,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19.492,81	20.997,93	24.177,97	30.889,08	29.039,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	785.251,77	812.406,53	701.666,19	767.995,24	765.032,84
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1.672.344,36	1.741.948,25	1.830.293,09	1.950.564,05	1.942.648,54
5. Perubahan Inventori	12.490,92	8.286,18	5.378,80	2.687,25	4.056,20
6. Net Ekspor-Impor	(553.763,97)	(491.494,03)	(365.824,51)	(402.273,10)	(372.367,75)
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4.107.805,85</b>	<b>4.394.324,35</b>	<b>4.639.404,86</b>	<b>4.947.790,35</b>	<b>4.944.028,97</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara



Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare

(Persen)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	53,21	53,49	54,26	54,27	54,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,45	0,48	0,53	0,64	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,34	15,90	13,54	13,57	13,42
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	42,38	41,12	41,39	42,43	41,92
5. Perubahan Inventori	0,26	0,15	0,09	0,05	0,08
6. Net Ekspor-Import	(12,64)	(11,13)	(9,81)	(10,96)	(10,42)
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran, Kota Parepare

(Persen)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,15	5,99	6,15	6,31	- 0,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,08	7,72	15,14	27,76	- 5,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- 1,54	3,46	-13,63	9,45	- 0,39
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,31	4,16	5,07	6,57	- 0,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor-Impor	-19,82	-11,24	-25,57	6,83	- 1,10
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,87</b>	<b>6,97</b>	<b>5,58</b>	<b>6,65</b>	<b>- 0,08</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)

Menurut Pengeluaran, Kota Parepare

(Persen)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	PDRB Seri 2010 menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,15	5,99	6,15	6,31	- 0,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,08	7,72	15,14	27,76	- 5,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	- 1,54	3,46	-13,63	9,45	- 0,39
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,31	4,16	5,07	6,57	- 0,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor-Impor	-	-	-	-	-
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,87</b>	<b>6,97</b>	<b>5,58</b>	<b>6,65</b>	<b>- 0,08</b>

Catatan : \*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten the Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PAREPARE**

Jl. Jend. Sudirman No.66 Parepare, 91122  
Telp. 0421-22766, email : [bps7372@bps.go.id](mailto:bps7372@bps.go.id)  
website : [pareparekota.bps.go.id](http://pareparekota.bps.go.id)

ISBN 978-623-94847-7-4



9 786239 484774